



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 25 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
25**

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI

**DECISION OF GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT
I BALI NUMBER 560 YEAR 1998**

ABOUT

**PROMULGATION OF DAERAH REGULATIONS KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG NUMBER 16
YEAR 1998 ABOUT CHANGING BUDGET
REVENUE AND EXPENDITURE DAERAH YEAR
BUDGET 1998/1999**

**GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 16 Tahun 1998 tanggal 9 Desember 1998 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 900/4031/Keu Tanggal 10 Desember 1998 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617.

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1998/1999 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1996;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-099
Tahun 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan
Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 570-
360 Tahun

1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 125 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai

berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

234

Tahun Anggaran 1998/1999 setelah
Perubahan menjadi Rp.
76.057.640.678,89 sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran
1998/1999 semula sebesar
Rp 71.657.614.000,00 bertambah
sejumlah
Rp. 4.400.026.679,89 sehingga
menjadi Rp. 76.057.640.679,89.

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1998/
1999 semula sebesar Rp.
71.657.614.000,00
bertambah sejumlah Rp.
4.400.026.678,89
sehingga menjadi Rp.
76.057.640.678,89 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin

:

Sebelum -
Perubahan Rp.
52.487.914.000,00 Bertambah
Rp. 987.360.678,89

Belanja Rutin -
setelah perub
bahanRp.
53.475.274.678,89

2. Belanja

Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
19.169.700.000,00 Bertambah
Rp. 3.412.666.000,00

Belanja Pembangunan-
setelah perubahan Rp.
22.582.366.000,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Urusan Kas dan
Perhitungan setelah Perubahan
menjadi Rp. 7.522.839.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitung
an Tahun Anggaran 1998/1999
semula sebesar

Rp. 7.513.839.000,00 bertambah
sejumlah

236

Rp. 9.000.000,00 sehingga menjadi ...
Rp. 7.522.839.000,00.

b. Anggaran Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan

Tahun Anggaran 1998/1999 semula
sebesar
Rp. 7.513.839.000,00 bertambah
sejumlah
Rp. 9.000.000,00 sehingga menjadi ...
Rp. 7.522.839.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin
: Sebelum -

P
e
r
u
b
a
h
a
n
R
p
.7
.5
1
3
.8
3
9
.0
0
0
,
0
0
B
e
r
t
a
m
b
a
h
R
p
.9
.0
0
0
.0
0
0
,
0

0

Belanja Rutin -
setelah peru-
bahan 7.522.839.00

2. Belanja
Sebelum -
Perubahan Rp. 0,00
Bertambah Rp. 0,00

Belanja Pembangunan-
setelah perubahan
Rp.....0,00

Pasal 2 Hal-hal yang

perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- 1) Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, maka terhadap Pendapatan Asli Daerah sendiri yang Dasar Hukumnya belum disesuaikan, Pemerintah Daerah Tingkat II agar segera menyusun Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Pungutan Pendapatan Asli Daerah Sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

17. Pengalokasian Subsidi Belanja Pegawai dan Non Pegawai supaya mempedomani lampiran III dan IV Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 perihal Rincian alokasi subsidi Daerah Otonom Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999.
18. Pada Tahun Anggaran mendatang pada Contoh A/ 1 Kolom 4 (empat) Keterangan Lampiran Keputusan supaya diberi penjelasan secara rinci, diawali dengan uraian subyek, obyek dan potensi dari target yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi dasar pengenaan, tarif, pokok pajak, tunggakan tahun yang lalu, denda tahun yang lalu dan tahun berjalan baik untuk Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1998 Nomor 910/3316/PUOD.
19. Pencantuman sumber dana pada Proyek agar mengikuti Ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri 1998 tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal penetapan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 Desember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**
BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

20. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta. (1 expl).
21. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
22. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
23. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
24. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
25. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
26. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
27. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (2 expl).
28. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja (1expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 25 Tanggal : 20
Pebruari 1999 Seri : D
Nomor : 25

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

PUTU WIJANAYA, SH
Pembina Utama
Madya NIP.
600002026

